

**IMPLEMENTASI PERUBAHAN SKEMA
PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI
(BPNT) DAN DAMPAKNYA TERHADAP
KESEJAHTERAAN SOSIAL PENERIMA DI
KALURAHAN PATALAN, JETIS, BANTUL**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana**

Disusun Oleh:

**Nurwahid Rizki Mailani
NIM 22102050080**

Dosen Pembimbing:

**Dr. Asep Jahidin, S.Ag., M.Si.
NIP 19750830 200604 1 002**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-869/Un.02/DD/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERUBAHAN SKEMA PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL PENERIMA DI KALURAHAN PATALAN, JETIS, BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURWAHID RIZKI MAILANI
Nomor Induk Mahasiswa : 22102050080
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



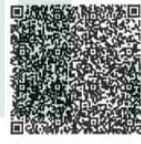
Ketua Sidang
Dr. Asep Jahidin, S.Ag., M.Si
SIGNED

Valid ID: 6a1f72de5b8e5



Penguji I
Dr. H. Zainudin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a192f228d735



Penguji II
Idan Ramdani, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a1e3ebc164f9



Yogyakarta, 26 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 6a1f80f1b0e4d

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nurwahid Rizki Mailani
NIM : 22102050080
Judul Skripsi : Implementasi Perubahan Skema Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Penerima di Kalurahan Patalan, Jetis, Bantul

skripsi tersebut sudah memenuhi syarat

- Bebas dari unsur plagiarisme
- Hasil pemeriksaan similaritas melalui Turnitin menunjukkan tingkat kemiripan sebesar 10% dengan menggunakan setelan "small match exclusion" sepuluh kata.
- Sistematika penulisan telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi yang berlaku.

dan sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Yogyakarta, 20 Mei 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing


Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc., PhD
NIP. 198108232009011007


Dr. Asep Jahidin, S.Ag., M.Si.
NIP. NIP 19750830 200604 1 002

- Silakan beri tanda centang (✓) jika pernyataan telah sesuai.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurwahid Rizki Mailani
NIM : 22102050080
Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: “Implementasi Perubahan Skema Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Sosial Penerima di Kalurahan Patalan, Jetis, Bantul” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Mei 2026

Yang menyatakan,



Nurwahid Rizki Mailani

NIM 22102050080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERHIJAB

SURAT PERNYATAAN BERHIJAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurwahid Rizki Mailani
NIM : 22102050080
Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak akan melepas jilbab pada foto Ijazah Sarjana dan Transkrip Nilai. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 Mei 2026

Yang menyatakan.



Nurwahid Rizki Mailani
NIM 22102050080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyenangi sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

- QS. Al-Baqarah: 216

“Nasib tidak bisa diduga, takdir tidak bisa diubah, tapi do’a dan usaha bisa merubah segalanya, *nothing is impossible when Allah said: Kun Fayakun.*”

- Ust Hanan Attaki

“*Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release*”

- Taylor Swift



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim di atas lembar yang menjadi saksi akhir perjalanan ini, penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Allah SWT sang maha pemilik arah yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih telah menjadi satu-satunya rumah tempat penulis pulang saat dunia terasa begitu kabur dan bising.
2. Kedua orang tua yang tercinta Bapak Wahyudi dan Ibu Suyatmi yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah mengantarkan penulis sampai di tempat ini, penulis persembahkan karya sederhana dan gelar ini untuk bapak dan ibu.
3. Diri saya sendiri, Nurwahid Rizki Mailani karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya sehingga penyusunan Tugas Akhir Skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERUBAHAN SKEMA PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL PENERIMA DI KALURAHAN PATALAN, JETIS, BANTUL” ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Sosial.

Terselesaikannya Tugas Akhir Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan peran berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Asep Jahidin, S. Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, serta memberi motivasi kepada penulis sepanjang penyusunan karya ilmiah ini. Terima kasih yang sebesar-sebesarannya atas ilmu, arahan, perhatian, dan waktu berharga yang telah bapak berikan.
5. Bapak Dr. H. Zainudin, M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA).

6. Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh staf Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah membekali ilmu, membimbing, dan membantu peneliti sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Pihak Kalurahan Patalan yang telah memberikan izin, dukungan, serta fasilitas kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Bapak Ari Ma'ruf, S.E, selaku Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Jetis sekaligus pendamping Program BPNT yang telah bersedia memberikan bantuan selama proses penelitian berlangsung.
9. Kepada kedua orang tua yang penulis hormati dan sayangi, yaitu cinta pertama sekaligus panutan penulis, Bapak Wahyudi dan pintu surga penulis, Ibu Suyatmi. Terima kasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga, dan pikiran. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang kuat dan sabar dalam memberikan kasih sayang dengan semua kesederhanaan. Bapak dan ibu memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik putri kecilnya dengan motivasi dan dukungan penuh kasih hingga mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
10. Adik laki-laki yang juga penulis sayangi, saudara Muhammad Adib Zainul Muttaqin. Terima kasih atas segala dukungan, doa, semangat, dan keceriaan yang selalu ditebarkan kepada penulis. Kehadiranmu menjadi salah satu kekuatan untuk penulis terus melangkah. Sehat selalu dan terus tumbuh menjadi anak laki-laki sekaligus adik kebanggaan penulis.

11. Teman-teman angkatan 2022 Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga, khususnya para sahabat Anin, Fany, Mustika, Rahma, Umi. Terima kasih atas dukungan dan motivasi yang selalu mengalir semasa perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini.
12. Sahabat-sahabat SMA penulis Rahma, Vera, Indah, Nita, Vivi. Terima kasih telah selalu hadir dalam setiap proses, baik suka maupun duka. Kebersamaan, tawa, dan dukungan yang terus diberikan kepada penulis menjadi bagian berharga yang menguatkan langkah penulis hingga sampai di titik ini.
13. Sahabat-sahabat penulis dari kecil di kampung halaman Desy, Ida, Citra, Nisa, Rosa. Terima kasih telah menjadi kakak bagi penulis yang selalu memberikan perhatian serta menjadi pendengar terbaik walaupun tak sedarah tapi selalu hadir untuk saya.
14. Teman-teman RAMASDA yang telah menjadi tempat untuk pulang dan bersama-sama berjuang dalam mengabdikan diri untuk kampung halaman.
15. Teman-teman KKN 117 Kelompok 97 UIN Sunan Kalijaga serta segenap warga Dusun Karangnongko, Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, yang telah menghadirkan warna baru dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas kebersamaan, sambutan hangat, kasih sayang, dan kehangatan yang diberikan selama pelaksanaan KKN. Kalian bukan sekadar teman dan masyarakat yang penulis temui pada masa akhir studi, melainkan telah menjadi keluarga baru yang memiliki ruang tersendiri di hati penulis.

16. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.

Semoga bantuan yang telah diberikan semua pihak dapat menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis berharap Tugas Akhir Skripsi ini dapat menjadi informasi bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 20 Mei 2026

Penulis,



Nurwahid Rizki Mailani

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perubahan skema penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari sistem nontunai melalui e-warong menjadi bantuan tunai menimbulkan perubahan pada mekanisme distribusi bantuan serta pola pemanfaatan bantuan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Perubahan kebijakan tersebut memunculkan berbagai dinamika dalam implementasi program dan berdampak terhadap kondisi kesejahteraan sosial penerima manfaat. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana implementasi perubahan skema penyaluran BPNT menjadi bantuan tunai serta bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan sosial penerima manfaat di Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perubahan skema penyaluran BPNT dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial KPM. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pemilihan informan secara *purposive sampling*. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis implementasi kebijakan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, sedangkan analisis kesejahteraan sosial menggunakan teori kesejahteraan sosial James Midgley. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perubahan skema penyaluran BPNT menjadi bantuan tunai di Kalurahan Patalan secara umum berjalan cukup baik meskipun masih terdapat kendala dalam proses pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan bantuan. Perubahan skema penyaluran BPNT juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial penerima manfaat, terutama dalam meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, mengelola masalah ekonomi rumah tangga, serta memberikan fleksibilitas penggunaan bantuan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas produktif keluarga.

Kata kunci: Bantuan Sosial; BPNT; Implementasi Kebijakan; Kesejahteraan Sosial; Skema Tunai.

ABSTRACT

The change in the distribution scheme of the Non-Cash Food Assistance Program from a non-cash mechanism through electronic mutual cooperation stores to direct cash assistance has resulted in changes to both the aid distribution mechanism and the patterns of aid utilization among beneficiary households. This policy change has generated various dynamics in program implementation and has affected the social welfare conditions of the beneficiaries. The research questions addressed in this study are how the transformation of the Non-Cash Food Assistance Program into cash assistance has been implemented and how this change has affected the social welfare of beneficiaries in Patalan Village, Jetis Subdistrict, Bantul Regency. This study aims to analyze the implementation of the change in the distribution scheme and its impact on the social welfare of beneficiary households. The study employed a descriptive qualitative method, with informants selected through purposive sampling. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Policy implementation was analyzed using the policy implementation theory developed by Van Meter and Van Horn, while social welfare was examined using James Midgley's social welfare theory. The findings indicate that the implementation of the change from non-cash to cash assistance in Patalan Village has generally proceeded quite well, although several obstacles remain in the implementation process and in monitoring the use of the assistance. The change in the distribution scheme has also had a positive impact on the social welfare of beneficiaries, particularly by improving their ability to meet basic needs, manage household economic problems, and providing greater flexibility in the use of assistance for education, health, and productive family activities.

Keywords: *Social Assistance; Non-Cash Food Assistance Program; Policy Implementation; Social Welfare; Cash-Based Scheme.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BERHIJAB	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoretis	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Landasan Teori	14
1. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	15
2. Perubahan Skema Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	17

3. Implementasi Kebijakan.....	18
4. Dampak Kebijakan	23
5. Kesejahteraan Sosial.....	25
G. Metode Penelitian.....	29
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
2. Subjek dan Objek Penelitian.....	30
3. Lokasi Penelitian.....	31
4. Sumber Data	31
5. Teknik Pemilihan Informan.....	33
6. Teknik Pengumpulan Data.....	34
7. Analisis Data.....	36
8. Teknik Uji Keabsahan Data.....	37
H. Sistematika Pembahasan	38
BAB II GAMBARAN UMUM	40
A. Gambaran Umum Kalurahan Patalan.....	40
1. Kondisi Geografis	40
2. Kondisi Demografis.....	42
3. Kondisi Sosial dan Ekonomi Kalurahan Patalan	42
4. Visi dan Misi Kalurahan Patalan	48
5. Struktur Organisasi Kalurahan Patalan	49
B. Gambaran Umum Program BPNT di Kalurahan Patalan.....	50
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	63
A. Implementasi Perubahan Skema Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai	63
1. Mekanisme Implementasi Penyaluran Program BPNT Skema Tunai	63
2. Analisis Implementasi Kebijakan	76

a. Standar dan Sasaran Kebijakan	77
b. Sumber Daya.....	81
c. Hubungan Antar Organisasi.....	84
d. Karakteristik Organisasi Pelaksana.....	89
e. Disposisi Implementor	92
f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.....	94
B. Dampak Perubahan Skema Penyaluran Program BPNT Terhadap Kesejahteraan Sosial Penerima Manfaat.....	100
1. Profil Informan KPM Program BPNT	101
2. Kondisi KPM Sebelum dan Sesudah Perubahan Skema Penyaluran.....	102
3. Analisis Kondisi Kesejahteraan Sosial KPM Program BPNT	104
a. Kemampuan Mengelola Masalah Sosial	105
b. Pemenuhan Kebutuhan Dasar	110
c. Kesempatan Peningkatan Taraf Hidup	113
BAB IV PENUTUP	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN.....	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rincian Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kalurahan Patalan.....	42
Tabel 2 Rincian Riwayat Pendidikan Masyarakat Kalurahan Patalan.....	43
Tabel 3 Klasifikasi Mata Pencaharian Masyarakat	44
Tabel 4 Kesejahteraan Keluarga Masyarakat Kalurahan Patalan.....	46
Tabel 5 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Patalan	49
Tabel 6 Jumlah KPM Setiap Padukuhan Per Desember 2025	57
Tabel 1 Profil Informan KPM Program BPNT.....	101
Tabel 2 Kondisi KPM Sebelum dan Sesudah Perubahan Skema Penyaluran.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Kalurahan Patalan.....	41
Gambar 2. 2 Peta Batas Wilayah.....	41
Gambar 3. 1 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).....	67
Gambar 3. 2 Monitoring Sampel KPM Skema Penyaluran Tunai.....	68
Gambar 3. 3 Penarikan Dana KPM Melalui Agen Penyalur (Agen BNI)	71
Gambar 3. 4 Penarikan Dana KPM Secara Mandiri	72
Gambar 3. 5 Monitoring dan Evaluasi Kondisi KPM	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi isu strategis yang hingga saat ini masih menjadi perhatian utama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2025 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 23,85 juta orang atau 8,47 persen dari jumlah penduduk.¹ Angka tersebut menegaskan bahwa kemiskinan tetap menjadi tantangan utama pembangunan nasional, terutama di wilayah perdesaan. Kondisi ini ditandai oleh rendahnya pendapatan dan keterbatasan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya kebutuhan pangan.²

Dalam perspektif Ilmu Kesejahteraan Sosial, kemiskinan dipahami sebagai masalah kesejahteraan yang ditandai oleh keterbatasan kemampuan individu atau keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Sejalan dengan pengertian tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi yang mencerminkan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara, sehingga memungkinkan mereka hidup layak, berkembang, dan berfungsi secara sosial. Salah satu intervensi pemerintah dalam

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), "Persentase Penduduk Miskin Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen.", diakses 27 Januari 2026.

² Adawiyah, "Kemiskinan dan Faktor-faktor Penyebabnya.", *Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Service*, 1, no. 1 (2020), hlm 43.

mengatasi masalah kesejahteraan berupa kemiskinan dilakukan melalui kebijakan bantuan sosial (Bansos). Pemerintah menyalurkan berbagai program bantuan sosial melalui beragam skema sebagai instrumen perlindungan sosial untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan. Bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar, serta menekan angka kemiskinan yang terjadi.³

Salah satu skema program bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan dalam memenuhi kebutuhan pangan adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT merupakan program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk pangan dan disalurkan tanpa menggunakan uang tunai.⁴ Penerima manfaat atau yang biasa disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan rumah tangga miskin dan rentan yang berada pada kelompok kesejahteraan rendah dengan kondisi sosial ekonomi 25 persen terbawah pada lokasi pelaksanaan program.⁵ Program BPNT menempatkan rumah tangga miskin sebagai sasaran intervensi kesejahteraan sosial agar individu dan keluarga yang

³ Ahmad Wahyudi Zein, Nurul Hikmah Pasaribu, dan Sukma Anggriani, "Evaluasi Dampak Program Bantuan Sosial terhadap Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Perdesaan.", *Menawan: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 3, no. 4 (2025), hlm 36-39.

⁴ Supiani dkk., "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada E-warong Di Kalurahan Harus Kecamatan Muara Kabupaten Tabalong.", *JAPB: Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis* 3, no. 2 (2020), hlm 675.

⁵ Jahratul Habibah, dkk., "Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara.", *Al lidara Balad Jurnal Administrasi Negara* 6, no. 1 (2024), hlm 146.

rentan terhadap kemiskinan tetap memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar.⁶

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 yang memperbolehkan penyaluran bantuan sosial dalam bentuk uang atau barang, serta didorong oleh masukan lembaga legislatif untuk penyederhanaan mekanisme distribusi, pemerintah melakukan penyesuaian skema penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pada tahun 2023, Kementerian Sosial melalui Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 01/SE/MS/2023 menetapkan perubahan mekanisme penyaluran BPNT dari saldo elektronik yang ditukarkan melalui e-warong menjadi bantuan tunai yang dapat dicairkan secara langsung oleh penerima manfaat melalui PT Pos Indonesia atau Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).⁷

Dalam implementasinya di lapangan, berdasarkan data awal yang diperoleh melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Jetis (TKSK) sekaligus pendamping Program BPNT, perubahan skema penyaluran BPNT menjadi bantuan tunai dapat mengubah mekanisme distribusi sekaligus konfigurasi peran aktor pelaksana.⁸ Dalam perspektif Ilmu Kesejahteraan Sosial, implementasi kebijakan di tingkat akar rumput (*street-level implementation*), TKSK selaku pendamping

⁶ Arif Wibowo dan Sari Viciawati Machdum, *Bantuan Sosial bagi Keluarga Masyarakat Miskin*, (Daerah Istimewa Yogyakarta: Kilau Kata, 2023), hlm 64.

⁷ Rahman dan Khumayah, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Efektivitas Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Indramayu.", *Jurnal Pendidikan Indonesia* 5, no. 12 (2024), hlm 2002.

⁸ Wawancara dengan Bapak AriMa'ruf (TKSK atau pendamping program) mengenai implementasi penyaluran skematunai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), 14 Januari 2026.

sosial berperan sebagai aktor kunci yang menjembatani kebijakan formal dengan praktik pelayanan sosial di tingkat komunitas.⁹

Berdasarkan data awal yang diperoleh melalui TKSK sekaligus pendamping program, transformasi penyaluran BPNT dari saldo elektronik menjadi tunai diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi, fleksibilitas pemanfaatan bantuan, serta memperkuat akses keluarga miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Di sisi lain, data awal di lapangan justru menunjukkan perubahan mekanisme penyaluran BPNT menjadi bantuan tunai berpotensi menimbulkan berbagai dinamika, baik dalam aspek pengawasan pendamping, proses pencairan bantuan, maupun pola pemanfaatan oleh penerima manfaat. Kondisi demikian berpotensi menggeser tujuan program, sehingga memerlukan kajian lebih lanjut untuk memahami bagaimana perubahan skema ini berlangsung dalam praktik di lapangan.¹⁰

Sejalan dengan beberapa studi sebelumnya, seperti pada survei Bank Dunia pada tahun 2020. Survei menunjukkan bahwa sekitar 20-30% penerima bantuan sosial tunai menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan nonpangan, seperti biaya kesehatan, pendidikan, atau bahkan barang konsumtif. Fleksibilitas penyaluran bantuan sosial dalam bentuk tunai berpotensi menjadi dampak yang akan memengaruhi pola konsumsi penerima manfaat. Beberapa penelitian menunjukkan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

bahwa bantuan yang diberikan secara tunai digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder hingga tersier tergantung pada keterbatasan ekonomi penerima manfaat.¹¹

Dalam perspektif Ilmu Kesejahteraan Sosial, perubahan kebijakan baru berupa perubahan mekanisme penyaluran bantuan tidak hanya berdampak pada aspek administratif implementasi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial penerima manfaat. Perubahan mekanisme penyaluran juga berpotensi memengaruhi peran pendamping sosial dalam melakukan pengawasan, sehingga berisiko pada kurang terarahnya pemanfaatan bantuan oleh penerima manfaat. Kondisi demikian dapat berpotensi memengaruhi efektivitas pemanfaatan bantuan dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga.¹²

Penelitian terdahulu yang berjudul “Implementasi Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Menjadi Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Mentangor Pekanbaru” berfokus pada aspek implementasi kebijakan dari sisi administratif menggunakan model George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, dengan temuan bahwa implementasi berjalan relatif baik meskipun masih terdapat kendala keterlambatan pencairan dan keterbatasan pemahaman KPM terhadap mekanisme bantuan tunai. Penelitian tersebut belum mengkaji peran aktor pelayanan sosial di tingkat akar rumput, seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

¹¹ Aldiyanto Abidju dkk., “Pengaruh Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat di Kalurahan Dunggala Kecamatan Tibawa”, *Menawan: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 3, no. 4, (2025), hlm 80.

¹² *Ibid.*

selaku pendamping sosial, serta belum mengaitkan implementasi kebijakan dengan dampaknya terhadap kesejahteraan penerima manfaat.¹³

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi celah kajian dengan memusatkan perhatian pada implementasi program BPNT setelah perubahan skema penyaluran dari saldo elektronik menjadi bantuan tunai di tingkat lokal. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana kebijakan diimplementasikan, sekaligus akan mengkaji dampak dari adanya implementasi kebijakan berupa perubahan skema penyaluran terhadap kesejahteraan penerima manfaat.

Penelitian ini penting dilakukan karena setiap kebijakan publik yang diimplementasikan memerlukan evaluasi untuk menilai tingkat keberhasilan implementasi serta dampak yang ditimbulkan terhadap kelompok sasaran, yaitu KPM. Kemudian fokus penelitian ini dibatasi pada implementasi perubahan skema penyaluran BPNT menjadi bantuan tunai, mencakup mekanisme baru dan analisis melalui berbagai variabel yang memengaruhi pelaksanaan program, baik sebagai faktor pendorong maupun penghambat, termasuk mekanisme penyaluran bantuan. Penelitian ini juga akan menganalisis dampak perubahan skema penyaluran terhadap kesejahteraan sosial penerima manfaat di Kelurahan Patalan, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

¹³ Liyana Azizah Surham, "Implementasi Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Menjadi Bantuan Langsung Tunai Di Kelurahan Mentangor Pekanbaru" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program BPNT setelah mengalami perubahan skema penyaluran menjadi bantuan tunai di Kalurahan Patalan, Jetis, Bantul?
2. Bagaimana dampak perubahan skema penyaluran Program BPNT terhadap kesejahteraan sosial penerima manfaat di Kalurahan Patalan, Jetis, Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi Program BPNT setelah mengalami perubahan skema penyaluran menjadi bantuan tunai di Kalurahan Patalan, Jetis, Bantul.
2. Untuk menganalisis dampak perubahan skema penyaluran Program BPNT menjadi bantuan tunai terhadap kesejahteraan sosial penerima manfaat di Kalurahan Patalan, Jetis, Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti, objek, dan para pembaca. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi manfaat teoretis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur implementasi kebijakan sosial, khususnya terkait mekanisme dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan berupa perubahan skema penyaluran bantuan sosial dari nontunai menjadi tunai.
- b. Memberikan kontribusi konseptual dalam analisis dampak implementasi kebijakan bantuan sosial tunai terhadap kesejahteraan penerima manfaat dalam perspektif Ilmu Kesejahteraan Sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti selanjutnya: penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan penelitian selanjutnya, baik dari aspek fokus kajian, metode, maupun konteks penelitian.
- b. Bagi TKSK dan pendamping program: penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih menyeluruh yang dapat dijadikan landasan dalam merencanakan pendampingan kepada kelompok sasaran.
- c. Bagi Kementerian Sosial: penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dalam meningkatkan efektivitas implementasi bantuan sosial tunai, khususnya Program BPNT. Serta sebagai pertimbangan dalam merumuskan solusi atas permasalahan yang ada.
- d. Bagi masyarakat dan penerima manfaat: penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan terkait mekanisme penyaluran Program BPNT skema tunai dan dampak perubahan skema agar bantuan dapat digunakan

secara lebih tepat untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan keberfungsian sosial keluarga.

E. Kajian Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian, peneliti melakukan tinjauan pustaka atau literatur berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian “Implementasi Perubahan Skema Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Penerima Manfaat di Kalurahan Patalan, Jetis, Bantul”. Tinjauan pustaka ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang hasil, keunggulan, dan keterbatasan penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian pustaka tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoretis, tetapi juga digunakan sebagai pijakan dalam menemukan celah penelitian (*research gap*) yang akan diisi oleh penelitian ini. Adapun berdasarkan hasil tinjauan pustaka yang telah dilakukan peneliti, kajian pustaka pada penelitian ini dibagi menjadi 3 tema utama sebagai berikut:

1. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Pertama, jurnal penelitian berjudul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Duren Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang”, yang ditulis oleh Titis Srimurni dan Millatus Sholihah, pada tahun 2022. Penelitian tersebut bertujuan menganalisis implementasi program BPNT untuk memastikan program berjalan efektif dan mencapai sasaran yang dituju. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik *purposive sampling*, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sudah berjalan sesuai ketentuan, meskipun

masih ditemukan kendala, seperti ketidaktepatan sasaran dan kelemahan dalam proses pendataan yang memerlukan pembaruan secara berkala. Batasan penelitian terletak pada analisis implementasi penyaluran Program BPNT terkhusus dalam skema tunai, serta berfokus pada kendala sasaran program. Belum terdapat juga kajian dampak implementasi BPNT terhadap kesejahteraan penerima manfaat secara komprehensif.¹⁴

Kedua, jurnal penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Tanjungpinang melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai Upaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)”, yang ditulis oleh Yokki Kurnia Perdana, dkk, pada tahun 2023. Penelitian tersebut bertujuan untuk memahami implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program BPNT di Kota Tanjungpinang sebagai upaya mencapai SDGs pada tahun 2022. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuh informan, pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BPNT dinilai cukup baik, namun masih terdapat kendala dalam penentuan penerima manfaat, perubahan sistem distribusi, serta secara keseluruhan Program BPNT yang dijalankan dianggap belum optimal efektif. Batasan penelitian terletak pada pendekatan kebijakan makro yang belum mengkaji implementasi pasca mengalami perubahan

¹⁴ Titis Srimurni dan Millatus Sholihah, “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Duren Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang”, *Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan* 2, no. 4 (2022).

skema penyaluran menjadi tunai, serta belum membahas dampak terhadap kesejahteraan penerima manfaat.¹⁵

Ketiga, jurnal penelitian berjudul “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo”, yang ditulis oleh Putri Rahayu dan Hanik Fitriani pada tahun 2023. Penelitian tersebut membahas implementasi BPNT melalui pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian yaitu mengetahui sudahkah pelaksanaan BPNT sesuai dengan tujuan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul pada saat implementasi program. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa BPNT cukup efektif dalam membantu mengurangi beban pengeluaran pangan rumah tangga miskin dan meningkatkan akses terhadap kebutuhan pangan melalui saldo elektronik, meskipun masih ditemukan beberapa permasalahan. Penelitian tersebut masih terbatas pada skema penyaluran nontunai dan belum mengkaji implementasi pasca perubahan skema penyaluran menjadi bantuan tunai. Kemudian pada analisis dampak masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar, belum mencakup dimensi kesejahteraan sosial penerima manfaat secara lebih luas.¹⁶

¹⁵ Yokki Kurnia Perdana, Dhani Akbar, dan Ryan Anggria Pratama, “Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Tanjungpinang melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Upaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).”, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 2 (2023).

¹⁶ Rahayu dan Hanik Fitriani, “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ponorogo.”, *Journal of Economics and Business Research* 3, no. 1 (2023).

2. Perubahan Skema Penyaluran BPNT dari Saldo Elektronik menjadi Tunai

Pertama, jurnal penelitian berjudul “Utopia Bantuan Pangan Non Tunai dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat”, yang ditulis oleh Fadjariani Sulistyowati dkk, pada tahun 2024. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan penyaluran BPNT dari sistem nontunai melalui E-warong menjadi penyaluran tunai melalui lembaga perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, diskusi kelompok terarah (FGD), observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan skema penyaluran menimbulkan sejumlah persoalan, antara lain kebingungan penerima manfaat terhadap mekanisme baru, menurunnya fungsi pemberdayaan e-warong, serta lemahnya pengawasan dan sosialisasi kebijakan. Penelitian tersebut masih terbatas pada analisis hambatan perubahan kebijakan penyaluran BPNT, belum secara spesifik menelaah mekanisme penyaluran tunai, serta dampak perubahan skema penyaluran terhadap kesejahteraan penerima manfaat.¹⁷

Kedua, penelitian skripsi berjudul “Implementasi Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Menjadi Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Mentangor Pekanbaru”, yang ditulis oleh Liyana Azizah Surham, pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi perubahan mekanisme BPNT menjadi bantuan langsung tunai. Penelitian

¹⁷ Fadjariani Sulistyowati dkk., “Utopia Bantuan Pangan Non Tunai dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat.” *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 13, no. 3 (2024).

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berjalan cukup baik dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian fokus pada dampak berupa kendala yang dialami penerima manfaat seperti keterlambatan pencairan, minimnya pemahaman pencairan. Penelitian ini masih terbatas pada analisis implementasi kebijakan secara umum dan belum mengkaji mekanisme penyaluran bantuan tunai di tingkat lokal berdasarkan variabel implementasi Van Meter dan Van Horn, khususnya terkait peran TKSK sebagai pendamping sosial. Selain itu, belum terdapat kajian dampak program terhadap kesejahteraan penerima manfaat.¹⁸

3. Dampak Program BPNT terhadap Kesejahteraan

Penelitian skripsi berjudul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Dondong, Jetis, Saptosari, Gunungkidul”, yang ditulis oleh Retno Wintari, pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BPNT berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan efektif meringankan beban pengeluaran keluarga penerima manfaat. Penelitian tersebut masih terbatas pada implementasi skema tunai, yang mana belum mengkaji implementasi perubahan skema penyaluran BPNT dari nontunai menjadi tunai. Di sisi lain pada pembahasan dampak kesejahteraan penerima manfaat yang dikaji masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar dan

¹⁸ Liyana Azizah Surham, “Implementasi Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Menjadi Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Mentangor Pekanbaru”, UIN Suska (2025).

belum menelaah dimensi penentu kesejahteraan secara luas, seperti pada teori kesejahteraan sosial James Midley.¹⁹

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian masih berfokus pada implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam skema tunai. Penelitian sebelumnya cenderung menempatkan implementasi kebijakan dalam perspektif administratif yang berfokus pada aspek prosedural, sehingga belum mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi implementasi. Dari sisi dampak, sebagian besar penelitian masih terbatas pada kajian kesejahteraan dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar. Sehingga penelitian yang akan dilakukan berupaya mengisi celah penelitian sebelumnya dengan mengkaji secara komprehensif implementasi Program BPNT dalam skema tunai pasca mengalami perubahan dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan perubahan skema tunai. Selain pada kajian implementasi, penelitian ini juga mengkaji dampak terhadap kesejahteraan sosial penerima manfaat, yang akan dianalisis menggunakan teori kesejahteraan sosial James Midgley dalam memperluas dimensi penentu kesejahteraan penerima manfaat.

F. Landasan Teori

Landasan teori perlu ada dalam suatu penelitian yang ditujukan agar penelitian memiliki dasar yang kuat, bukan sekadar percobaan semata. Landasan teori menjadi ciri bahwa penelitian itu adalah cara ilmiah sebagai upaya

¹⁹ Retno Wintari, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Dondong, Jetis, Saptosari, Gunungkidul", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

memperoleh data dan menjawab permasalahan penelitian. Landasan teori berisi kumpulan teori, konsep, dan generalisasi relevan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penelitian sekaligus menganalisis temuan penelitian.²⁰

1. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

a. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah salah satu bagian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa bantuan nontunai. Pelaksanaan program BPNT didasarkan pada UU No. 18 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat yang mengalami kerentanan pangan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemenuhan pangan merupakan hak dasar warga negara yang menjadi tanggung jawab negara.

Program BPNT menjadi salah satu bentuk kebijakan perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pangan. Bantuan ini diberikan dalam bentuk bantuan pangan yang disalurkan setiap bulannya melalui mekanisme saldo elektronik yang hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dengan menukarkan saldo elektronik dengan bahan pangan sembako seperti beras, telur, buah-buahan, dan lain sebagainya. KPM menukarkan saldo elektronik melalui agen

²⁰ Sugiyono, “*Buku Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 52.

yang disebut e-warong yang bekerja sama dengan Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).²¹

b. Prinsip pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Dalam implementasinya, terdapat prinsip utama yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan untuk memastikan aksesibilitas dan optimalisasi manfaat bagi KPM, dimulai dari kemudahan akses yang memungkinkan pemanfaatan langsung tanpa hambatan yang berarti. Prinsip ini diperkuat dengan pemberian pilihan serta kendali penuh kepada KPM dalam menentukan waktu, jumlah, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan, sambil mendorong pemberdayaan usaha eceran masyarakat serta akses layanan keuangan yang inklusif. Lebih lanjut, fleksibilitas dalam memperoleh pasokan dari berbagai sumber dipadukan dengan pemisahan peran yang tegas antara penyalur bantuan dan penyedia bahan pangan, sehingga menciptakan ekosistem penyaluran yang efisien, transparan, dan berkelanjutan.²²

c. Kriteria penerima manfaat

Berdasarkan penjelasan Tenaga Kesejahteraan Kecamatan (TKSK) Jetis kriteria penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditetapkan berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial keluarga yang tergolong miskin dan rentan miskin. BPNT tidak memiliki komponen khusus seperti pada Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga penerimanya ditentukan secara umum berdasarkan kategori kemiskinan. Penerima BPNT berasal dari keluarga miskin yang termasuk

²¹ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, *“Buku Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta Pusat, 2018), hlm 5.

²² *Ibid*, hlm 11.

dalam kelompok desil bawah, yaitu desil 1 sampai dengan desil 4, yang mencerminkan tingkat kesejahteraan sosial rendah dan kebutuhan akan dukungan pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya pangan.²³

Penetapan penerima manfaat BPNT dilakukan melalui mekanisme pendataan berjenjang yang dimulai dari musyawarah kalurahan, kemudian diverifikasi oleh Dinas Sosial hingga tercatat dalam basis data nasional. Sejak tahun 2025, penetapan penerima mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan integrasi dari DTKSK, data kemiskinan ekstrem, dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) BPS. BPNT dapat diterima secara mandiri maupun bersamaan dengan PKH, mengingat BPNT bersifat tidak bersyarat dan ditujukan untuk menjangkau keluarga miskin secara lebih luas. Dengan demikian, kriteria penerima BPNT menekankan pada kondisi kemiskinan objektif berdasarkan data resmi pemerintah dan hasil kesepakatan sosial di tingkat lokal.²⁴

2. Perubahan Skema Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

a. Penyaluran Secara Nontunai

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam kajian teoretis dipahami sebagai bentuk bantuan sosial yang disalurkan melalui mekanisme nontunai dengan tujuan utama menjamin pemenuhan kebutuhan pangan keluarga miskin. Dalam skema ini, bantuan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai,

²³ Ari Ma'ruf, wawancara mengenai skema penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 14 Januari 2026.

²⁴ *Ibid.*

melainkan melalui saldo elektronik yang melekat pada kartu bantuan dan hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan tertentu di E-warong atau agen resmi yang telah ditunjuk. Penyaluran BPNT secara nontunai dirancang untuk memastikan ketepatan sasaran dan penggunaan bantuan sesuai tujuan program, sekaligus memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian distribusi bantuan. Dengan pembatasan jenis komoditas dan tempat transaksi, BPNT skema nontunai menempatkan negara sebagai pengendali utama arah pemanfaatan bantuan, sehingga penerima manfaat berperan sebagai pengguna bantuan dalam kerangka kebijakan yang telah ditentukan.²⁵

b. Penyaluran Secara Tunai

Berdasarkan penjelasan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Jetis penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara tunai merupakan bentuk perubahan kebijakan bantuan sosial yang mengalihkan mekanisme penyaluran dari pembatasan komoditas pangan menuju pemberian dana langsung kepada keluarga penerima manfaat. Dalam skema ini, bantuan disalurkan melalui sistem perbankan dengan mentransfer dana ke rekening penerima yang dapat dicairkan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sehingga penerima memiliki keleluasaan dalam menentukan penggunaan dana sesuai kebutuhan rumah tangga.²⁶

3. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

²⁵ Cetrayon dkk., “Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai Oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok”, *Jurnal Public Administration, Business and Rural Development Planning* 5, no 1 (2023), hlm 3-4.

²⁶ *Ibid.*

Implementasi merupakan tindakan sebagai bentuk pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB), implementasi diartikan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merujuk pada tindakan yang dilakukan secara nyata untuk merealisasikan suatu rencana, kebijakan, atau ide yang telah dirancang dengan teliti untuk memenuhi tujuan tertentu. Dapat dikatakan implementasi dilakukan dengan penuh keyakinan dan tujuan yang jelas.²⁷

Menurut Nurdin Usman yang dikutip dalam penelitian Ardina Prafitasari, implementasi berfokus pada serangkaian aktivitas, tindakan, atau adanya suatu sistem yang berfungsi. Implementasi bukan hanya aktivitas biasa, melainkan sebuah proses yang direncanakan dengan tujuan tertentu. Menurut Guntur Setiawan dalam penelitian Ardina Prafitasari, implementasi merupakan perluasan kegiatan yang saling beradaptasi antara tujuan yang ditetapkan dengan langkah yang diambil untuk mencapainya.²⁸

b. Teori Implementasi Kebijakan (Van Meter dan Van Horn)

Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam jurnalnya yang berjudul *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework* tahun 1975. Van Meter dan Van Horn menjelaskan implementasi

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, “Arti kata implementasi”, diakses 1 Februari 2026, <https://kbbi.web.id/implementasi>.

²⁸ Ardina Prafitasari dan Ferida Wiludjeng, “Organisasi Kepemudaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi.”, *Jurnal Translitera* 4 (2016), hlm 36.

kebijakan merupakan aktivitas yang dijalankan institusi, organisasi, maupun pemerintah, baik personal maupun grup yang mana ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.²⁹ Van Meter dan Van Horn memandang implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang berlangsung secara berkelanjutan antara kebijakan publik, pelaksana kebijakan, dan tindakan implementasi di lapangan.³⁰

Menurut Van Horn dan Van Meter, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel yang saling berkaitan dan berpengaruh terhadap kinerja implementasi suatu kebijakan. Adapun enam variabel dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn tersebut dijelaskan sebagai berikut:

(1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan teori yang dikemukakan Van Horn dan Van Meter, standar dan sasaran kebijakan merujuk pada kejelasan tujuan, ukuran keberhasilan, serta arah kebijakan yang hendak dicapai. Suatu kebijakan akan berjalan lebih efektif, apabila tujuan dan sasarannya dirumuskan secara jelas, realistis, dan dapat dipahami oleh para pelaksana maupun kelompok sasaran. Pada penelitian ini, variabel standar dan sasaran kebijakan digunakan untuk menganalisis bagaimana kejelasan tujuan kebijakan perubahan skema penyaluran dipahami dan diterapkan oleh pelaksana maupun penerima manfaat dalam implementasinya di lapangan.

(2) Sumber Daya

²⁹ Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework.", *Jurnal Administration and Society* 6, no 4 (1975), hlm 445-446.

³⁰ *Ibid.*

Dalam perspektif Van Horn dan Van Meter sumber daya juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan yang mencakup sumber daya manusia, sumber daya finansial, serta sarana dan prasarana pendukung. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan mempermudah pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebaliknya, jika terdapat keterbatasan sumber daya, maka dapat menghambat implementasi kebijakan meskipun kebijakan tersebut telah dirancang dengan baik. Dalam penelitian ini, variabel sumber daya digunakan untuk menganalisis ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan perubahan skema penyaluran BPNT, baik yang berkaitan dengan peran pendamping program, dukungan anggaran, sistem penyaluran bantuan, maupun fasilitas pendukung lainnya dalam implementasi kebijakan di lapangan.

(3) Hubungan Antar Organisasi

Hubungan antar organisasi mengacu pada pola komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan memerlukan komunikasi yang konsisten agar tujuan kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan secara selaras oleh seluruh aktor pelaksana. Adanya koordinasi yang baik antar organisasi pelaksana akan mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Ketika komunikasi dan koordinasi yang lemah dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan program. Peneliti akan menganalisis hubungan antar organisasi mencakup koordinasi antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Pemerintah Kalurahan, TKS atau pendamping

program, bank penyalur, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran skema tunai.

(4) Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana mencakup struktur organisasi, pembagian tugas, norma kerja, serta kapasitas dan profesionalitas aparat pelaksana. Organisasi pelaksana berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan dengan kelompok sasaran, sehingga kondisi internal organisasi pelaksana juga memengaruhi efektivitas dari implementasi kebijakan. Organisasi yang memiliki struktur jelas, pembagian kerja yang terstruktur, dan sumber daya manusia yang kompeten akan lebih mampu menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam analisis implementasi kebijakan berupa perubahan skema penyaluran, variabel karakteristik organisasi pelaksana dapat dilihat melalui pembagian tugas antara pendamping program, pemerintah kalurahan, serta padukuhan. Baik dalam hal proses pendampingan, verifikasi data, dan monitoring pelaksanaan program.

(5) Disposisi Implementor

Disposisi implementor merujuk pada sikap, komitmen, pemahaman, dan tingkat penerimaan pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan optimal apabila implementor memiliki pemahaman yang baik serta sikap yang mendukung terhadap kebijakan yang dijalankan. Dalam penelitian ini, disposisi implementor dilihat dari bagaimana sikap pendamping program dan aktor

pelaksana dalam memahami, menerima, serta menjalankan implementasi kebijakan berupa perubahan skema penyaluran BPNT menjadi bantuan tunai.

(6) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik menjadi faktor eksternal yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan tempat kebijakan tersebut dijalankan. Lingkungan yang kondusif akan mempermudah pelaksanaan kebijakan, sedangkan kondisi lingkungan yang kurang mendukung dapat menimbulkan berbagai hambatan implementasi. Dalam penelitian ini, lingkungan sosial ekonomi dilihat dari kondisi masyarakat penerima manfaat BPNT di Kalurahan Patalan, termasuk kondisi ekonomi rumah tangga, karakteristik pekerjaan masyarakat, serta pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan bantuan sosial.³¹

4. Dampak Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dampak adalah benturan atau pengaruh kuat yang menghasilkan konsekuensi, baik yang menguntungkan maupun merugikan. Dampak juga dipahami sebagai efek, hasil, atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu perkara atau tindakan hal lain. Dampak positif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan hal yang baik atau bersifat menguntungkan. Berbeda dengan dampak negatif, dampak negatif adalah pengaruh kuat yang

³¹ *Ibid*, hlm 463–467.

mendatangkan hal kurang baik dan menyimpang dari umum atau bersifat merugikan bahkan memperburuk keadaan.³²

Menurut Gorys Keraf dalam Julifitri dan Prakoso (2023), dampak adalah pengaruh yang signifikan dari individu atau sekelompok orang dalam melaksanakan peran dan posisinya sesuai dengan kedudukan mereka di masyarakat, yang akan menghasilkan konsekuensi terhadap perubahan baik positif maupun negatif. Menurut Otto Soemarwoto dampak merujuk pada suatu perubahan yang muncul sebagai hasil dari suatu kegiatan. Kegiatan yang dimaksud dapat bersifat alami, baik dari segi kimia, fisika, maupun biologi.³³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan (kata benda) adalah sekumpulan ide dan prinsip yang menjadi kerangka dan dasar rencana untuk melaksanakan sebuah tugas, kepemimpinan, dan tindakan. Dengan kata lain, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi strategi untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan suatu tugas.³⁴ Menurut Irfan Islamy dampak kebijakan adalah akibat dan konsekuensi yang muncul dengan dilaksanakannya kebijakan.³⁵

Dampak kebijakan publik merupakan konsekuensi yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan suatu kebijakan, baik yang direncanakan maupun yang

³² Utary Telung, Michael Mantiri, dan Josef Kairupan, "Dampak Pemekaran Desa dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi di Desa Raringis, Raringis Utara, Raringis Selatan, Kecamatan Langowan Barat)", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019), hlm 3.

³³ *Ibid.*

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, "Arti kata bijak", diakses 2 Februari 2026.

³⁵ Utary Telung, Michael Mantiri, dan Josef Kairupan, "Dampak Pemekaran Desa dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi di Desa Raringis, Raringis Utara, Raringis Selatan, Kecamatan Langowan Barat)", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019), hlm 3.

tidak direncanakan. Menurut Thomas R. Dye, dampak kebijakan mencakup seluruh manfaat dan biaya yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, serta dapat muncul dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak kebijakan juga dipahami sebagai perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh kebijakan tersebut. *Output* merujuk pada aktivitas atau tindakan yang dilakukan pemerintah, sedangkan *outcome* atau dampak menunjukkan perubahan nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran maupun masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, pengukuran dampak kebijakan tidak cukup hanya melihat keterlaksanaan program, tetapi harus menilai sejauh mana kebijakan tersebut memengaruhi kondisi dan kehidupan penerima manfaat serta lingkungan kebijakan.³⁶

5. Kesejahteraan Sosial

a. Definisi dan Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan merupakan kondisi yang menunjukkan terpenuhinya pemenuhan kebutuhan hidup yang baik, seimbang, dan berkualitas, baik dari segi fisik, mental, sosial, maupun finansial.³⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, kesejahteraan diartikan sebagai kondisi sejahtera yang mencakup aspek keamanan, keselamatan, ketenteraman, kemakmuran, dan kondisi kehidupan yang baik secara umum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

³⁶ Marsekaldo Riv Aldo Manzanaris, Joyce J Rares, dan Burhanuddin Kiyai, "Dampak Relokasi Pasar Tradisional Rawajaya Di Wilayah Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara"

³⁷ Anggia Ramadhan, Ahmad Fadlan, dan Muhammad Handoko Tarigan, *Buku Teori Kesejahteraan Usaha Tani Padi*, (Medan: Tahta Media Group, 2025), hlm 1.

Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak serta mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut Sitti Rukmana dalam bukunya, kesejahteraan sosial dipahami sebagai konsep yang bersifat multidimensional, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia seperti kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, relasi sosial, serta kualitas hidup secara menyeluruh. Secara komprehensif, kesejahteraan sosial merujuk pada situasi di mana individu dan kelompok masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya, layanan, dan lingkungan sosial yang mendukung mereka untuk mengembangkan potensi diri secara optimal serta menjalani kehidupan yang bermakna, sehat, dan produktif.³⁸

b. Indikator Kesejahteraan Sosial James Midley

James Midgley dalam bukunya, menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan konsep multidimensional. Di mana kesejahteraan sosial tidak hanya berorientasi pada pemenuhan ekonomi, tetapi juga mencakup kemampuan individu dalam menghadapi permasalahan sosial, serta memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Dalam perspektif Migdley, kesejahteraan sosial berkaitan dengan upaya pembangunan sosial (*social developmet*) yang menekankan integrasi antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Sehingga, kesejahteraan sosial dapat dimaknai sebagai suatu

³⁸ Sitti Rukmana Patty, *Buku Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Tahta Media Group: 2025), hlm 2.

kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, mengembangkan potensi diri, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara optimal.

James Midgley menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial terdiri atas tiga unsur utama, mencakup kemampuan individu dalam mengelola masalah sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, serta memperoleh kesempatan untuk maju atau meningkatkan kualitas hidup. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam menggambarkan tercapainya kondisi kesejahteraan sosial individu maupun keluarga. Dalam penelitian ini, Teori Kesejahteraan Sosial James Midgley digunakan sebagai dasar dalam menganalisis dampak perubahan skema penyaluran BPNT terhadap kesejahteraan sosial Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun 3 unsur penentu kondisi kesejahteraan sosial yang dikemukakan James Midgley yaitu sebagai berikut.³⁹

(1) Kemampuan mengelola masalah sosial (*Social Problems are Manage*)

Individu atau keluarga yang mencapai kesejahteraan sosial ditandai dengan kemampuan dalam mengatasi masalah sosial yang dapat menghambat keberfungsian sosialnya. Adapun masalah sosial yang dimaksud merujuk pada kondisi yang mengganggu kemampuan individu atau keluarga dalam menjalankan fungsi sosialnya secara optimal, seperti kesulitan ekonomi, ketergantungan terhadap bantuan sosial, konflik rumah tangga, serta keterbatasan akses layanan sosial. Peneliti menggunakan indikator kemampuan mengelola masalah sosial sebagai alat analisis untuk melihat sejauh mana perubahan skema penyaluran BPNT

³⁹ James Midgley, "Buku Social Development the Development.", (London: Sage Publications, 1995, hlm 14-15.

menjadi tunai berdampak pada kemampuan KPM dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan hambatan sosial dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

(2) Pemenuhan Kebutuhan Dasar (*the Meeting of Needs*)

Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan indikator penting dalam penentuan kesejahteraan sosial individu atau keluarga. Pemenuhan kebutuhan dasar mencakup kemampuan individu atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar untuk mempertahankan keberlangsungan hidup secara layak. Kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi pangan (*nutrition*), papan (*shelter*), kesehatan (*healthy care*), serta kebutuhan pokok lainnya (*basic needs satisfaction*), sebagai kebutuhan utama yang harus dipenuhi secara layak dan berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan dasar menjadi salah satu fondasi kesejahteraan sosial karena mencerminkan kondisi keamanan dan stabilitas kehidupan individu atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peneliti menggunakan indikator pemenuhan kebutuhan dasar sebagai penentu kesejahteraan sosial sebagai alat analisis untuk melihat sejauh mana perubahan skema penyaluran BPNT menjadi tunai berdampak terhadap kemampuan KPM dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, khususnya dalam hal pangan.

(3) Kesempatan untuk maju tersedia (*Opportunities for Advancement*)

Unsur ketiga kesejahteraan menurut Midgley adalah tersedianya kesempatan bagi individu dan keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup. Kesempatan untuk maju dalam perspektif kesejahteraan sosial berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya sosial yang mendukung pengembangan potensi dan kemampuan individu. Melalui adanya kesempatan

tersebut, individu tidak hanya mampu mempertahankan kehidupannya, tetapi juga memiliki peluang untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Peneliti menggunakan indikator kesempatan untuk maju tersedia sebagai alat analisis untuk melihat sejauh mana perubahan skema penyaluran BPNT menjadi bantuan tunai memberikan peluang bagi KPM dalam meningkatkan kondisi hidupnya, baik melalui pengelolaan bantuan yang lebih fleksibel maupun pemanfaatannya untuk menunjang kebutuhan ekonomi rumah tangga.⁴⁰

G. Metode Penelitian

Dalam memecahkan suatu permasalahan yang diajukan dalam sebuah penelitian, dibutuhkan suatu metode atau cara tertentu yang dipilih secara spesifik. Menurut Sugiyono, metodologi penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan dalam upaya untuk menemukan atau mendapatkan data demi tujuan atau kegunaan tertentu.⁴¹ Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Menurut Creswell, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia. Penelitian kualitatif digunakan untuk mempelajari budaya suatu kelompok dan mengidentifikasi serta mengetahui perkembangan pola perilaku

⁴⁰ *Ibid*, hlm 15.

⁴¹ Sugiyono, “*Buku Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 2.

seiring berjalannya waktu.⁴² Yin mendefinisikan studi kasus sebagai eksplorasi mendalam suatu kasus (kejadian, proses, program) secara komprehensif untuk memahami dinamika di baliknya.⁴³

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif jenis studi kasus dapat digunakan untuk memahami secara mendalam satu fenomena kebijakan, yaitu perubahan skema penyaluran BPNT dari nontunai menjadi tunai, yang dikaji secara mendalam di Kalurahan Patalan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini nantinya akan berwujud kata-kata dan gambar. Oleh karena itu, temuan penelitian termuat kutipan data untuk menguraikan bagaimana laporan disajikan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah sumber data atau yang biasa disebut dengan informan. Informan yaitu individu atau pihak yang dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap fenomena sosial yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, subjek penelitian yaitu TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial) selaku pendamping program atau disebut aktor implementasi, penerima manfaat yang secara langsung merasakan dampak perubahan skema program, serta kamituwa kalurahan yang memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat.

b. Objek Penelitian

⁴² Ahmad Fauzi dkk, “*Buku Metodologi Penelitian*”, (Banyumas Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022), hlm 13.

⁴³ *Ibid*, hlm 23.

Menurut Sugiyono, objek penelitian adalah seluruh hal yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk selanjutnya dipelajari dan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah implementasi perubahan skema penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari saldo elektronik menjadi bantuan tunai, serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial penerima manfaat di Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa hal. Pertama, Kalurahan Patalan merupakan wilayah yang telah mengimplementasikan perubahan skema penyaluran BPNT menjadi tunai sejak tahun 2023 dan belum pernah dijadikan lokasi penelitian terkait bantuan sosial, khususnya mengenai perubahan skema BPNT. Selain itu, Kalurahan Patalan memiliki jumlah KPM BPNT yang cukup besar, yaitu 1.146 KPM yang tersebar di 20 dusun, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh variasi pengalaman penerima terkait pencairan, pendampingan, dan pemanfaatan bantuan pasca perubahan skema. Pemilihan lokasi juga didukung oleh kemudahan aksesibilitas karena merupakan wilayah tempat tinggal peneliti, sehingga mempermudah proses pengumpulan dan pendalaman data penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Sumber data disebut

informan, ketika dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data juga bisa bersumber dari pustaka, yaitu dokumen (buku, arsip, catatan harian, dan lain-lain) sebagai sumber utamanya.⁴⁴ Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer (*Primary Source*)

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti atau yang memerlukan dan diperoleh secara langsung dari informan di lapangan. Sumber data primer diperoleh menggunakan beberapa metode, yaitu peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁴⁵ Dalam penelitian ini, sumber data primer meliputi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kapanewon Jetis sekaligus pendamping Program BPNT Kalurahan Patalan sebagai aktor yang terlibat dalam implementasi, kemudian penerima manfaat BPNT sebagai pihak yang mengalami langsung dampak perubahan skema penyaluran.

b. Sumber Data Sekunder (*Secondary Source*)

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti atau yang memerlukan dengan mengumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder digunakan untuk mendukung informasi primer yang didapat dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.⁴⁶ Data

⁴⁴ Wijaya dkk., "Sumber Data, Subjek Penelitian, dan Isu Terkait", *Jurnal Edukatif* 3, no. 2 (2025), hlm 272.

⁴⁵ Inayah dkk., "Adaptasi Sosial SDN 1 Pineleng menghadapi Dampak Covid-19 di Kalurahan Pineleng 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa", *Jurnal Ilmiah Society* 2, no.4 (2022), hlm 2.

⁴⁶ *Ibid.*

pendukung tersebut bersumber dari dokumen atau arsip yang relevan dengan penelitian, Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Skema Tunai, data penerima manfaat, dokumentasi pendamping program, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini, pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, teknik *purposive sampling* adalah penentuan informan dengan pertimbangan tertentu atau memiliki karakteristik khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar data yang diambil relevan dengan fokus kajian.⁴⁷ Dalam penelitian ini, kriteria informan yang dibutuhkan terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. TSKK atau Pendamping Program:

- (1) Merupakan pendamping Program BPNT Kalurahan Patalan yang telah melakukan pendampingan sebelum dan sesudah peluncuran skema penyaluran yang baru hingga sekarang.
- (2) Terlibat aktif dalam proses koordinasi dengan pemerintah kalurahan, dinas sosial, dan lembaga penyalur terkait pelaksanaan BPNT.

b. Penerima Bantuan Pangan Non Tunai:

- (1) Penerima BPNT aktif dan memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang digunakan untuk mencairkan dana.
- (2) Berdomisili tetap di Kalurahan Patalan.
- (3) Pernah menerima penyaluran dana BPNT dalam dua skema penyaluran, yaitu

⁴⁷ Andriani et al., "Pemilihan Teknik Sampling yang Tepat Dalam Penelitian Kualitatif", *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 6, no. 4 (2025).

dalam bentuk saldo elektronik dan tunai.

- (4) Sudah menikah dan terlibat dalam menentukan penggunaan keuangan rumah tangga.
- (5) Mengelola secara langsung dana BPNT (mulai dari penerimaan hingga penggunaannya untuk kebutuhan keluarga).

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari suatu penelitian itu sendiri adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam studi kasus adalah teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pemilihan informan harus didasarkan pada kemampuan mereka dalam menyumbang suatu pemahaman tentang fenomena yang akan diteliti.⁴⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono 2013, menjelaskan bahwa wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk berbagi informasi dan pemikiran melalui proses tanya jawab dalam rangka membangun pemahaman suatu topik. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) selaku pendamping Program BPNT Kalurahan Patalan, penerima manfaat, dan kamituwa Kalurahan Patalan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur, di mana peneliti memiliki pedoman wawancara

⁴⁸ Ahmad Fauzi et al., “*Buku Metodologi Penelitian*”, (Banyumas Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022), hlm 23.

berupa draf pertanyaan yang digunakan untuk penggalan informasi subjek yang telah disiapkan, namun pertanyaan masih bisa diperluas seiring berjalannya proses wawancara.⁴⁹ Selama proses wawancara berlangsung, peneliti mencatat informasi penting yang disampaikan oleh informan disertai dengan merekam data yang relevan untuk keperluan analisis.

b. Observasi

Menurut Sugiyono observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik observasi nonpartisipan. Artinya peneliti tidak terlibat dan hanya menjadi pengamat independen.⁵⁰ Observasi dilakukan terhadap proses pencairan dana BPNT oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai data pendukung untuk memahami implementasi perubahan skema penyaluran BPNT dari saldo elektronik menjadi bantuan tunai serta dampaknya terhadap penerima manfaat.

c. Dokumentasi

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti. Dokumen merujuk pada bahan tertulis atau media visual yang tersedia dan tidak disiapkan khusus untuk kepentingan penelitian.⁵¹ Dokumen yang dimaksud dalam

⁴⁹ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D ”*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 140.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 145.

⁵¹ Warul Walidin, dkk., *“Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory”*, (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), hlm 138.

penelitian ini seperti dokumen pelaksanaan program, buku panduan program, foto penyaluran program, jurnal terkait, laporan monitoring evaluasi pelaksanaan program, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya.

7. Analisis Data

Menurut Solimun Armanu dalam Sugiyono 2013, analisis data adalah proses untuk mengubah data hasil dari sebuah proses penelitian menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan.⁵² Dapat dikatakan juga sebagai proses menyusun sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi untuk nantinya data diorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan untuk menghasilkan informasi yang membantu peneliti mengambil keputusan terkait permasalahan penelitian. Adapun langkah-langkah dalam analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses mengorganisasikan, mengurangi, dan meringkas data yang telah dikumpulkan agar menjadi lebih berpola dan mudah dianalisis. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting. Prosesnya dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai tema yang sama, kemudian membuang data yang tidak diperlukan sehingga didapat

⁵² Ahmad Fauzi dkk, “*Buku Metodologi Penelitian*”, (Banyumas Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022), hlm 95.

kesimpulan akhir. Reduksi data diperlukan, sebab data yang diperoleh semakin lama peneliti di lapangan data akan semakin kompleks dan rumit.

b. Penyajian data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dibuat dalam bentuk teks yang bersifat naratif yang berisi uraian singkat, hubungan antar kategori, dan seterusnya. Proses penyajian data dilakukan dengan pengkategorian data yang sama dimasukkan dalam kelompok-kelompok tersendiri.

c. Penarikan kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan berisi temuan baru yang belum ada pada penelitian sebelumnya. Pada proses ini dilakukan pengukuran alur, sebab, dan akibat, menentukan klasifikasi hasil penelitian. Dalam penyusunan kesimpulan perlu disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan di awal.

8. Teknik Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data diperlukan untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.⁵³ Triangulasi sumber adalah menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber atau

⁵³ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat.", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020), hlm 150.

informan. Kemudian triangulasi teknik adalah pencampuran metode pengumpulan data berbeda, seperti wawancara mendalam, observasi nonpartisipan, dan analisis dokumen, untuk saling melengkapi dan mengurangi bias.⁵⁴

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah peneliti dalam melakukan analisis dan menyusun penelitian, maka peneliti menguraikan sistematika penulisan dalam penelitian secara garis besar. Mengacu pada buku Pedoman Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2025, sistematika penulisan penelitian kualitatif dibagi ke dalam 4 bab. Kemudian bab yang telah disusun dibagi lagi dalam subbab di mana antar subbab satu dengan subbab lainnya memiliki batasan dan relevansi. Adapun sistematika penulisan akan dipaparkan sebagai berikut:

Sebelum masuk pada bab 1, penulisan didahului dengan halaman judul, halaman pengesahan, surat persetujuan skripsi, surat pernyataan keaslian skripsi, halaman persembahan, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini menjadi dasar konseptual penelitian terkait

⁵⁴ Fathor Rasyi, “*Buku Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*”, (Yogyakarta: Nadi Pustaka Offset, 2022), hlm 196-203.

implementasi perubahan skema penyaluran BPNT dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial penerima manfaat.

BAB II Gambaran Umum, pada bab ini berisi tentang gambaran umum Kelurahan Patalan sebagai lokasi penelitian yang meliputi kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta kepengurusan pemerintah Kelurahan Patalan. Selain itu, bab ini juga memaparkan gambaran umum Program BPNT dan karakteristik penerima program perubahan skema penyaluran dari nontunai menjadi tunai. Pembahasan pada bab ini memiliki keterkaitan dengan analisis implementasi maupun dampak kesejahteraan pada bab berikutnya, karena kondisi sosial ekonomi masyarakat, karakteristik wilayah, serta gambaran umum program menjadi konteks yang memengaruhi proses implementasi kebijakan sekaligus memengaruhi kondisi kesejahteraan penerima manfaat.

BAB III Pembahasan, pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari lapangan. Pembahasan difokuskan pada implementasi perubahan skema penyaluran BPNT menjadi bantuan tunai berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial penerima manfaat menggunakan teori kesejahteraan sosial James Midgley. Analisis dilakukan secara terpadu untuk melihat keterkaitan antara implementasi kebijakan dengan kondisi kesejahteraan penerima manfaat.

BAB IV Penutup, pada bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan hasil dan pembahasan penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat beberapa saran dan rekomendasi yang ditujukan bagi pihak yang relevan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi perubahan skema penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi bantuan tunai di Kalurahan Patalan secara umum telah berjalan cukup baik, terutama dalam meningkatkan kemudahan akses, fleksibilitas, dan efisiensi pemanfaatan bantuan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Perubahan mekanisme dari sistem nontunai melalui *e-warong* menjadi bantuan tunai memberikan keleluasaan bagi KPM dalam menyesuaikan penggunaan bantuan sesuai kebutuhan rumah tangga. Namun, efektivitas implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan keterlambatan pencairan bantuan, keterbatasan pengawasan terhadap penggunaan bantuan, serta masih adanya ketergantungan sebagian KPM terhadap pendamping dalam memahami mekanisme penyaluran tunai.
2. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, implementasi perubahan skema BPNT dipengaruhi oleh keterkaitan antar variabel implementasi kebijakan. Komunikasi dan koordinasi antar pelaksana yang berjalan cukup baik mampu mendukung kelancaran pelaksanaan program di lapangan. Ketersediaan sumber daya, fasilitas pencairan bantuan, serta disposisi pelaksana yang responsif juga menjadi faktor yang memperkuat implementasi kebijakan. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam dan lemahnya kontrol terhadap pemanfaatan bantuan masih menjadi

tantangan dalam mencapai tujuan program secara optimal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh perubahan mekanisme penyaluran, tetapi juga oleh kemampuan aktor pelaksana dalam menjaga koordinasi, pendampingan, dan pengawasan selama kebijakan dijalankan.

3. Perubahan skema penyaluran BPNT menjadi bantuan tunai memberikan dampak positif dan meningkatkan kesejahteraan sosial KPM. Berdasarkan perspektif James Midgley, skema tunai membantu KPM dalam mengelola masalah ekonomi rumah tangga (*social problems are managed*), meningkatkan fleksibilitas pemenuhan kebutuhan dasar (*the meeting of needs*), serta memberikan peluang dalam menunjang kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas produktif keluarga (*opportunities for advancement*). Meskipun demikian, peningkatan kesejahteraan yang dirasakan KPM masih bersifat membantu keberlangsungan kebutuhan sehari-hari dan belum sepenuhnya mampu mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat. Dengan demikian, skema tunai dinilai lebih adaptif terhadap kebutuhan rumah tangga penerima manfaat, tetapi tetap memerlukan pendampingan dan pengawasan agar pemanfaatannya sesuai tujuan program.

B. Saran

1. Bagi TKSK dan pendamping program, perlu dilakukan peningkatan pendampingan dan sosialisasi secara berkelanjutan kepada KPM terkait mekanisme pencairan serta pemanfaatan bantuan tunai. Pendamping juga perlu memperkuat edukasi mengenai penggunaan bantuan sesuai kebutuhan prioritas

rumah tangga agar bantuan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif sesaat, tetapi juga mendukung keberlangsungan kesejahteraan keluarga. Selain itu, monitoring secara berkala diperlukan untuk mengetahui kendala yang dialami KPM selama proses pencairan maupun pemanfaatan bantuan.

2. Bagi Kementerian Sosial, diperlukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi dalam implementasi BPNT skema tunai, khususnya terkait informasi resmi waktu pencairan bantuan dan pengawasan penggunaan bantuan oleh penerima manfaat. Pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi antar pelaksana program, baik dengan pemerintah kalurahan, TKSK, maupun pihak bank penyalur agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan meminimalkan kendala administratif di lapangan. Selain itu, penyediaan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami masyarakat juga penting untuk mengurangi ketergantungan KPM terhadap pendamping program.
3. Bagi masyarakat dan penerima manfaat, diharapkan bantuan tunai dapat dimanfaatkan secara lebih bijak dan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas rumah tangga, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan keluarga. Penerima manfaat juga diharapkan lebih aktif memahami mekanisme pencairan bantuan agar tidak sepenuhnya bergantung pada pendamping program serta mampu memanfaatkan bantuan secara lebih mandiri dan produktif.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan kajian mengenai implementasi dan dampak bantuan sosial tunai dengan cakupan yang lebih luas. Peneliti selanjutnya juga dapat

mengkaji efektivitas bantuan sosial tunai terhadap perubahan perilaku konsumsi, tingkat kemandirian ekonomi, serta kesejahteraan penerima manfaat dalam jangka panjang dengan menggunakan pendekatan dan perspektif teori yang lebih beragam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidju Aldiyanto, Sri Endang Saleh, Roy Hasiru, Frahmawati Bumulo, dan Ardiansyah Ardiansyah. “Pengaruh Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat di Desa Dunggala Kecamatan Tibawa.” *Menawan: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 3, no. 4 (Juni 2025): 79–90. <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i4.1525>.
- Adawiyah. “Kemiskinan dan Faktor-faktor Penyebabnya.” *Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Service* 1, no. 1 (2020): 43.
- Ahmad Wahyudi Zein, Nurul Hikmah Pasaribu, dan Sukma Anggriani. “Evaluasi Dampak Program Bantuan Sosial terhadap Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Perdesaan.” *Menawan: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 3, no. 4 (Juni 2025): 36–45. <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i4.1526>.
- Alman, Sofia Pangemanan, dan Josef Kairupan. “Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Mengatasi Kemiskinan di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung.” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2018)
- Andriani, Desi, Donna Boedi Maritasari, Ismiatul Laela, dan Siti Husnadia. “Pemilihan Teknik Sampling yang Tepat Dalam Penelitian Kualitatif: Literature Review.” *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 6, no. 4 (Juli 2025): 6238–47. <https://doi.org/10.54373/imeij.v6i4.3783>.
- Arti kata bijak, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, diakses 2 Februari 2026. <https://kbbi.web.id/bijak>.
- Arti kata implementasi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, diakses 1 Februari 2026. <https://kbbi.web.id/implementasi>.
- Asyhabuddin. “Welfare Society dalam Sistem Kesejahteraan Sosial di Indonesia.” *ICODEV: Indonesian Community Development Journal* 2, no. 2 (2021): 32. <https://doi.org/10.24090/icodev.v3i1.6232>
- Badan Pusat Statistik. “Persentase Penduduk Miskin Maret 2025 Turun Menjadi 8,47 Persen.” Diakses 27 Januari 2026. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2518/persentase-penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-8-47-persen-.html>
- Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. *Keputusan Direktur Jenderal Nomor 40 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Program Sembako Skema Tunai*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2025.

- Fadjariani Sulistyowati, Hari Saptaning Tyas, Widati Widati, dan Condrodewi Puspitasari. "Utopia Bantuan Pangan Non Tunai dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat." *Sosio Konsepsia* 13, no. 1 (November 2024). <https://doi.org/10.33007/ska.v13i3.3389>.
- Fauzi, Ahmad, et al. *Buku Metodologi Penelitian*. Banyumas, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022.
- Habibah, Jahratul, Ni Made Musiyani Anjasmari, dan M. Husaini, "Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Al Idara Balad: Jurnal Administrasi Negara* 6, no. 1 (2024): 146.
- Jannah, Raudhatul. "Literasi Digital Finance pada Penerima Dana Bantuan Program Keluarga Harapan." *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2024): 47. <https://doi.org/10.52490/attijarah.v6i1.3014>
- Julfitri, Rizka Indriani, dan Cathas Teguh Prakoso, "Implementasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi Dalam Mengakses Fasilitas Publik di Kota Samarinda", *eJournal Administrasi Publik* 11, no. 3, 2023.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pedoman Umum Program Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2018. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018.
- Manzanaris, Marsekaldo Rivaldo, Joyce J. Rares, dan Burhanuddin Kiyai. "Dampak Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Rawajaya di Wilayah Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara." n.d.
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (September 2020): 145–51. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.
- Padang, Benyamin Banga, Masje S Pangkey, dan Alden Laloma. "Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai Megamas bagi Masyarakat Nelayan di Kecamatan Wenang Kelurahan Wenang Selatan Kota Manado.", *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2022).
- Pemerintah Kalurahan Patalan. "Website Resmi Kalurahan Patalan." Diakses Januari 2026. <https://patalan.bantulkab.go.id>.

- Pemerintah Kalurahan Patalan. "Peta Batas Wilayah Kalurahan Patalan." YouTube video. Diakses Januari 2026. <https://youtube.com>.
- Prafitasari, Ardina, dan Ferida Asih Wiludjeng. "Organisasi Kepemudaan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi." *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi dan Studi Media* 4, no. 2 (Maret 2018): 31-48.
<https://doi.org/10.35457/translitera.v4i2.351>
- Pratomo, Pandu, Sri Suwitri, dan Ari Subowo. Analisis Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 3 Semarang (Kajian Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang 420/3271 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Reguler Di Kota Semarang 2010/2011) n.d.
- Rahayu, Putri dan Hanik Fitriani. "Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ponorogo." *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 3, no. 1 (Juni 2023).
<https://doi.org/10.21154/niqosiya.v3i1.1758>.
- Rahman, Habib, dan Siti Khumayah. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Efektivitas Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kabupaten Indramayu.", *Jurnal Pendidikan Indonesia* 5, no. 12 (2024) n.d.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2017.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2012.
- Srimurni, Titis, dan Millatus Sholihah. "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Duren Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang." *Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan* 2, no. 4 (2022). "44185-97730-1-SM." n.d.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Surham, Liyana Azizah. *Implementasi Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Menjadi Bantuan Langsung Tunai di*

Kelurahan Mentangor Pekanbaru. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

- Suryany, Eva. "Pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Secara Tunai Oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok", *Jurnal Public Administration, Business and Rural Development Planning* 5, no. 1 (2017) ejournal.stia-lppn.ac.id/index.php/index/index
- Telung, Uтары, Michael Mantiri, dan Josef Kairupan. "Dampak Pemekaran Desa dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Studi di Desa Raringis, Raringis Utara, Raringis Selatan, Kecamatan Langowan Barat).", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019) n.d.
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*. Jakarta:Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018.
- Walidin, Warul, Saifullah, dan Tabrani ZA. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015. Diakses 30 Januari 2026. <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/1301/1/Full%20Buku%20MP%20Kualitatif%20&%20Grounded%20Theory.pdf>
- Waryadi, Herdiawan. "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-warong di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi." *Jurnal Dialektika Politik* 6, no. 2 (2022): 178.
- Wibowo, Arif, dan Sari Viciawati Machdum. *Bantuan Sosial bagi Keluarga Masyarakat Miskin*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Kilau Kata, 2023.
- Walidin, Warul, Saifullah, dan Tabrani ZA. *Metode Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015. Diakses 30 Januari 2026. <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/1301/1/Full%20Buku%20MP%20Kualitatif%20&%20Grounded%20Theory.pdf>
- Wijaya, Fadila Ramadona, Fehan Alya Rahmi Lubis, Mhd Najib Sihab Siregar, dan Azmi Ayu Fauziah Batubara, "Sumber Data, Subjek Penelitian, dan Isu Terkait.", *Jurnal Edukatif* 3, no. 2 (2025) n.d. <https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/edukatif>
- Wintari, Retno. "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Dusun Dondong, Jetis, Saptosari, Gunungkidul." Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020).

Yokki Kurnia Perdana, Dhani Akbar, dan Ryan Anggria Pratama. “Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kota Tanjungpinang melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Upaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 3 (Juli 2023): 288–300.
<https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i3.1060>.

Zakirin Muhammad, dan Jauhar Arifin “Evaluasi Kebijakan Dilihat dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur (Studi Kasus pada Komponen Pendidikan).” *JAPB: Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis* 5, no. 1 (2022): 256–271.
<http://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPBManongga>.